

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM),
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP),
DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH (SAKD) TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Datar Provinsi Sumatera Barat)**

**Oleh:
Latifatul Yaswat
Pembimbing : Taufeni Taufik dan Enni Savitri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: latifadoank@ymail.com*

*Effect Of Competence Human Resources, Government Internal Control System,
and The Implementation Of Financial Accounting System
Of The Effectiveness Of Financial Management Are
(Empirical Study On Regional Working Unit Tanah Datar regency of West
Sumatera Province)*

ABSTRACT

This research aims to determine the competence human resource, government internal control system, and the implementation of financial accounting system on the effectiveness of financial management area. This study using purposive sampling method. The population in this study servants Tanah Datar region, namely the head of department, chief financial officer, treasurer receipts and expenditures. Samples and this research is 88 respondents who have met the criteria for a sample. The collection data techniques used is by distributing questionnaires. The data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS. Results of testing the hypothesis in this study indicate that the competence human resources, government internal control system and the implementation financial accounting systems significantly affect the effectiveness of financial management area.

Keywords: competence, human resources, internal control system, financial accounting system, and effectiveness

PENDAHULUAN

Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dimana PP No. 58 tahun 2008 mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk

melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) diantaranya: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Pada Semester I Tahun 2014 BPK RI Barat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2014. Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Kepala Perwakilan DPR. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atas LKPD Kabupaten Tanah Datar TA 2014.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk pemerintahan Kabupaten Tanah Datar diantaranya :

- a. Belum konsisten dalam menerapkan kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Kinerja Majelis TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) harus lebih ditingkatkan dalam menangani masalah-masalah Kerugian Daerah (KERUDA) di Pemkab Tanah Datar

Kerugian negara/daerah adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan hasil BPK RI bahwa Kabupaten Tanah Datar terdapat 3 kasus terhadap KERUDA (Kerugian Daerah) dengan merugikan keuangan negara sebesar 71,76 miliar.

Atas adanya paragraf penjelasan tersebut, BPK RI Perwakilan Sumatera Barat merekomendasikan kepada Pemkab Tanah Datar untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku agar Pemkab Tanah Datar dapat meningkatkan opini yang diperolehnya tahun depan menjadi WTP murni.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Kabupaten Tanah Datar memiliki kelemahan terhadap SPI yang dominan dalam pemeriksaan keuangan adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 3 kasus atau 42% dari jumlah kelemahan SPI. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan terhadap sistem pengendalian internalnya yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan kecurangan dan penyelewengan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkecimpung di dunia

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan hasil penelitian Anggelina (2013) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo) dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gorontalo.

Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan yang hasil akhirnya adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang baik didukung oleh informasi yang memadai, maka dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Pradita, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian Reny Febriani (2011) tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada

Cimahi

Penelitian ini merupakan

Selain itu, penulis juga

Rumusan masalah uraian pada

Kuangan Daerah dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPKabupaten Tanah Datar).

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui : 1) pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, 2) pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, 3) pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPD Kabupaten Tanah Datar).

LANDASAN TEORI

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian efektivitas dari pendapat ahli Mardiasmo (2002:134) dan PP No. 58 tahun 2005 pasal 1 tentang keuangan daerah maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas

Menurut Angga Dwi Permadi (2013) terdapat beberapa indikator pada sistem akuntansi keuangan daerah diantaranya :

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sudah memenuhi SAP.
2. Pengindentifikasian
3. Pencatatan
4. Pengklasifikasian
5. Pelaporan

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten berdasarkan, menurut Saleba (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten akan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, begitu pula sebaliknya apabila sumber daya tidak berkompeten maka dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak tercapai. Hal ini didukung oleh pengetahuan, perilaku, dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan penelitian Siti Nurjannah (2014) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa semakin kompeten sumber daya manusia maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik sebaliknya kompetensi sumber daya manusia yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk. Hal ini didukung oleh pengetahuan, perilaku, dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan uraian tersebut terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Penelitian Angga Suprayogi (2010) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

H2 : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh Terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan yang hasil akhirnya adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang baik didukung oleh informasi yang memadai, maka dapat disimpulkan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Pradita, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian Reny Febriani (2011) tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Pemerintah Kota Cimahi menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dimana SAKD termasuk ke dalam kriteria “sangat baik”.

H3 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar berjumlah 23 SKPD.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengambilan data dengan membagikan kuisioner kepada kepala pimpinan dan kepala sub bagian keuangan.

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Pengujian data menggunakan uji validitas, uji realibilitas, dan uji normalitas serta menggunakan uji asumsi klasik yaitu: uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji auto korelasi.

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Pengujian Data

Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya (Wijaya, 2011). Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Sekaran, 2003).

ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson.

(Santoso 2007: 218) mengatakan bahwa deteksi adanya autokorelasi secara umum jika angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Koefisien Determinasi(R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2001).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis satu, dua dan tiga dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Praiyo, 2012). Kriterianya adalah apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²).

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1

Descriptive Statistics

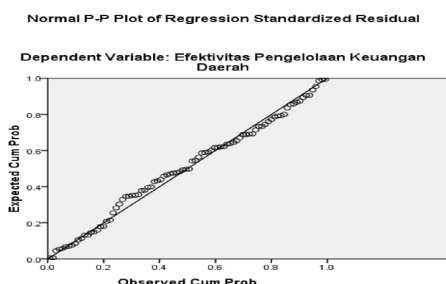
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	88	37.00	55.00	47.6250	4.28392
Kompetensi Sumber Daya Manusia	88	27.00	45.00	37.8977	4.12461
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	88	70.00	110.00	93.9659	9.70656
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	88	28.00	40.00	37.0000	3.26950
Valid N (listwise)	88				

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Berdasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai nilai minimum 37 dan nilai maksimum 55. Nilai mean 47,62 dengan standar deviasi 4,284. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai minimum 27 dan nilai maksimum 45. Nilai mean 37,89 dengan standar deviasi 4,125. Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai nilai minimum 70 dan nilai maksimum 110. Nilai mean 93,97 dengan standar deviasi 9,707. Sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai nilai minimum 28 dan nilai maksimum 40. Nilai mean 37,00 dengan standar deviasi 3,269.

Hasil Uji Normalitas

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan SPSS,2015

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat dipenuhi. Selain itu uji normalitas ini juga bisa menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan membandingkan *Asymptotic Significance* $\alpha = 5\%$. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan distribusi normal apabila *Asymptotic Significance* $> 0,05$ (Ghozali, 2009).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

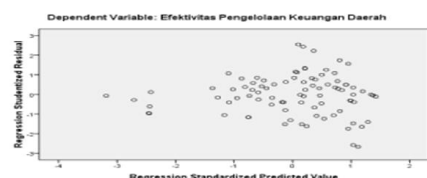
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.751	1.331	Bebas Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.440	2.274	Bebas Multikolinieritas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.524	1.909	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel dapat diketahui bahwa hasil uji multikolineritas seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* berada dibawah atau $< 0,10$ dan nilai VIF diatas atau > 10 . Jadi disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolineritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS,2015

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Diketahui nilai durbin Watson terletak antara -2 dan +2 $-2 < 1,836 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 6,625 + 0,275 X_1 + 0,106 X_2 + 0,557 X_3 + e$$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh R^2 sebesar 0.586. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 58,6%. Sedangkan sisanya 41,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini seperti pengawasan fungsional dan kinerja pegawai.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_1 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} =$

$3,273 > 1,989$ dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan setiap bagian dalam pemerintahan diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Sehingga hipotesis pertama (H_1) **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjannah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Arsyati, Darwanis dan Muslim A. Djalil yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_2 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,268 > 1,989$ dengan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta

memelihara sistem pengendalian intern yang memadai secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hipotesis kedua (H₂) **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2010) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Tri Anung Anindita (2012) bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H₃ diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 4,378 > 1,989$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H₀ ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan daerah pada Kabupaten Tanah Datar secara sistematis mulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah telah terlaksana dengan baik. Selain

itu, penerapan sistem akuntansi pada pemerintahan Kab. Tanah Datar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehingga hipotesis kedua (H₃) **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reny Febriani (2011) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Irman (2008) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan dalam pencapaian tujuan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh unsur-unsur sistem akuntansi keuangan daerah yaitu kesesuaian

efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

- Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat). Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Pradita, Gilang (2010). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Jurnal. Universitas Widyatama. Bandung.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saleba, Siti Nurjannah (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suprayogi, Angga (2010). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Warisno, 2009. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- <http://www.bpk.go.id>. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2014.
- <http://www.padang.bpk.go.id>. Mei, 25, 2013. Kabupaten Tanah Datar Meraih Opini WTP.
- <http://www.tanah.datar.go.id>.